



**WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 48 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara agar lebih efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5477) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ( Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1227);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Padang.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
7. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Padang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Non ASN adalah setiap orang yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat dengan SPT adalah Surat tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN atau Non ASN untuk melakukan perjalanan dinas.

14. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada ASN dan Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas.
15. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang.
16. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh ASN.
18. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
19. Paspor dalam rangka perjalanan dinas luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada ASN Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik
20. *Exit permit* adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas.
21. *Visa* adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara bersangkutan.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. Biaya riil adalah, biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan berlaku.
25. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
26. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor SKPD berada.
27. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
28. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah untuk menugaskan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dan tenaga lainnya melakukan perjalanan dinas.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Aparatur Sipil Negara dan tenaga lainnya yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
31. Datasering adalah penugasan sementara waktu.

## **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. prinsip dan jenis perjalanan dinas;
- b. tata cara administrasi perjalanan dinas;
- c. jangka waktu;
- d. sarana angkutan
- e. biaya perjalanan dinas;
- f. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- g. pembatalan.

**BAB II**  
**PRINSIP DAN JENIS PERJALANAN DINAS**  
**Pasal 3**

Perjalanan Dinas hanya dilakukan untuk melaksanakan pekerjaan bagi kepentingan negara dan/atau daerah dengan memperhatikan prinsip :

- a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

**Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dalam Daerah dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Daerah dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sumatera Barat dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di Luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) termasuk perjalanan yang dilakukan dalam hal sebagai berikut :
  - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. Mengikuti rapat, seminar dan kegiatan sejenis lainnya;
  - c. Pengumandahan (datasering);
  - d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar;
  - e. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53;
  - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
  - g. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
  - h. ditugaskan menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pimpinan /anggota dewan yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;

**BAB III**  
**TATA CARA DAN ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**  
**Pasal 5**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas dalam daerah dilengkapi dengan SPT dan SPPD.

- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut:
  - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh PA/KPA;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
  - c. ASN dan Non ASN oleh PA/KPA.

**Bagian Kedua**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi**  
**Pasal 6**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
  - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
  - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
  - c. ASN dan Non ASN oleh Asisten Administrasi atas nama Sekretaris Daerah.

**Bagian Ketiga**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi**  
**Pasal 7**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dilengkapi dengan SPT dan SPPD.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
  - c. Pejabat Eselon II, Kepala SKPD Eselon III oleh Wali Kota atau Wakil Wali Kota.
  - d. Pejabat Eselon III selain Kepala SKPD dibawah dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah
- (3) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai berikut :
  - a. Wali Kota dan Wakil Walikota oleh Sekretaris Daerah;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD; dan
  - c. ASN dan Non ASN oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Struktural dapat didampingi oleh staf paling banyak 4 (empat) orang pada daerah tujuan dan waktu yang sama.

**Bagian Keempat**  
**Perjalanan Dinas Luar Negeri**  
**Pasal 8**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kerjasama luar negeri.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:
  - a. kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. studi banding;
  - d. seminar;
  - e. lokakarya;
  - f. konferensi;
  - g. promosi potensi daerah;
  - h. kunjungan persahabatan atau kebudayaan;
  - i. pertemuan Internasional; dan
  - j. penandatanganan perjanjian internasional.
- (4) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan peningkatan hubungan kerjasama luar negeri.
- (5) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal antara lain:
  - a. terjadi bencana alam;
  - b. terjadi bencana sosial;
  - c. pemilihan umum presiden dan wakil presiden; dan
  - d. pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (6) Hasil perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara konkrit dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurusan surat izin dilakukan 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan.

**Pasal 9**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri;
  - b. paspor dinas (*service passport*);
  - c. *exit permit*;
  - d. visa;
- (3) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kerjasama dan perjalanan dinas dalam rangka penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf j, ditambah dengan naskah kerjasamaberupa *Letter of Intent* (LOI) dan *Memorandum Of Understanding* (MoU), Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama dari Kementerian Luar Negeri dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (4) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka pendidikan dan

pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b ditambah dengan surat keterangan beasiswa.

- (5) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf g, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (6) Dokumen administrasi perjalanan dinas dalam rangka kunjungan persahabatan atau kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf h, ditambah dengan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

- (1) Perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan secara rombongan dilakukan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan.
- (2) Perjalanan dinas ke luar negeri secara rombongan dapat dilakukan lebih dari 5 (lima) orang dalam hal:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. perundingan dalam rangka kerjasama dengan pihak luar negeri; dan
  - c. delegasi kesenian dalam rangka promosi potensi daerah.

#### **Pasal 11**

Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berdasarkan surat rekomendasi:

- a. menteri;
- b. sekretaris Jenderal;
- c. direktur Jenderal Otonomi Daerah;
- d. sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; atau
- e. kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama.

#### **Pasal 12**

- (1) Walikota mengajukan permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan melampirkan:
  - a. surat undangan;
  - b. kerangka acuan kerja;
  - c. foto copy DPA yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
  - d. surat keterangan pendanaan.

#### **Bagian Kelima Prosedur Pasal 13**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus melapor ke perwakilan Republik Indonesia di luar negeri untuk mendapat pengesahan.
- (2) Dalam hal wilayah tujuan perjalanan dinas luar negeri tidak terdapat perwakilan Republik Indonesia, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat pengesahan dari pejabat setempat yang berwenang.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pihak yang mengundang untuk kegiatan tersebut.

**BAB IV**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 14**

- (1) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan paling lama 10 (sepuluh) hari perjalanan dinas dalam 1 (satu) bulan, kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (2) Perjalanan dinas dalam daerah luar Provinsi dan luar daerah luar Provinsi, dapat dilakukan paling lama 5 (lima) hari, dan kelebihan dari ketentuan ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.
- (3) Non ASN dalam melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan, kecuali mendampingi Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, atau Ketua DPRD.

**BAB V**  
**SARANA ANGKUTAN**  
**Pasal 15**

Sarana angkutan perjalanan sebagai berikut :

- a. perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dalam provinsi menggunakan sarana angkutan darat; dan
- b. perjalanan dinas ke luar daerah luar provinsi menggunakan sarana angkutan udara dan/atau sarana angkutan lainnya.

**BAB VI**  
**BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**Bagian Kesatu**  
**Perjalanan Dinas Dalam Daerah**  
**Pasal 16**

Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, diberikan uang transportasi.

**Bagian Kedua**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi**  
**Pasal 17**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
  - a. uang transport;
  - b. uang penginapan; dan
  - c. uang harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (5) Uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang

- bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas.
  - (7) Apabila kendaraan dinas yang dipergunakan dalam kota tempat tujuan lebih dari 1 (satu) hari maka dibantu tambahan BBM.

**Bagian Ketiga**  
**Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi**  
**Pasal 18**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari:
  - a. biaya transport;
  - b. uang harian;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi perjalanan dinas; dan
  - e. biaya taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan oleh Wali Kota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Eselon II diberikan uang representasi.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kendaraan dinas diberikan bantuan BBM.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan angkutan umum, diberikan bantuan transportasi.
- (5) Apabila kendaraan dinas yang dipergunakan dalam kota tempat tujuan lebih dari 1 (satu) hari maka dibantu tambahan BBM.

**Pasal 19**

- (1) Apabila biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a melebihi dari biaya yang telah ditetapkan, maka kelebihan harga tiket dapat dibayarkan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran rill (pembiayaan secara at cost)
- (2) Apabila tiket sudah dipesan atau dibeli Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN tidak melaksanakan perjalanan karena perintah atasan atau tugas yang harus dilaksanakan, maka tiket tetap dibayarkan.

**Pasal 20**

Uang harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b dibayarkan lumpsum sesuai dengan lama perjalanan dinas yang dibuktikan dengan tiket dan boarding pass.

**Pasal 21**

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil dibuktikan dengan bill Hotel selama perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari dari uang penginapan.
- (3) Dalam hal biaya penginapan lebih besar dari plafon anggaran yang tersedia, ASN dapat menggabungkan biaya penginapan sepanjang tidak melebihi dari plafond masing-masing jabatan ASN.

## **Pasal 22**

- (1) Biaya taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e diberikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN untuk menunjang kegiatan perjalanan dinas.
- (2) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kali meliputi :
  - a. Dari kantor atau rumah ke bandara;
  - b. Dari bandara ke hotel;
  - c. Dari hotel ke bandara; dan
  - d. Dari bandara ke kantor atau rumah.
- (3) Apabila biaya taksi melebihi dari tarif yang telah ditetapkan maka kelebihanannya akan dibayarkan at cost sesuai dengan bukti pembayaran.

## **Bagian Keempat Perjalanan Dinas yang tidak ditanggung Pasal 23**

- (1) Bagi perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan, uang saku dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan, hanya diberikan uang transportasi dan Taksi.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas sudah ditanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN diberikan 1 (satu) hari perjalanan dinas keberangkatan atau kepulangan.
- (3) Perjalanan dinas yang melebihi waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dibayarkan kecuali ada persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- (4) Jika persetujuan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada, maka pengelompokan uang harian/penginapan tenaga lainnya disamakan dengan biaya terendah pada uang harian/penginapan.
- (5) Perjalanan dinas dapat dikoordinir oleh biro perjalanan sepanjang biaya jasa biro perjalanan tidak dibebankan pada APBD.

## **Bagian Kelima Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Pasal 24**

Kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas ke Luar Negeri diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :

- a. uang transportasi; dan
- b. uang paket terdiri dari :
  1. uang makan;
  2. uang saku;
  3. uang transportasi local; dan
  4. penginapan.

## **Pasal 25**

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya rill ditambah dengan airport tax dan biaya Fiskal/Visa.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dibayarkan lumpsum sesuai tiket dan boarding pass.

- (3) Jika perjalanan dinas yang telah disediakan penginapan dan makan selama pelaksanaan di daerah tujuan diberikan uang saku sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b.

**BAB VII**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 26**

- (1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya yang terdiri dari :
  - a. persetujuan dan SPT;
  - b. SPPD yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan ;
  - c. tiket dan *boarding pass*;
  - d. bill/bukti pembayaran penginapan/hotel;
  - e. laporan perjalanan dinas.
- (2) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dalam propinsi dan luar daerah luar propinsi wajib menyampaikan laporan tertulis hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang memberikan SPT dan SPPD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya waktu perjalanan dinas.
- (3) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN yang melakukan perjalanan luar negeri wajib membuat laporan tertulis hasil perjalanan dinas luar negeri dan melaporkan hasil perjalanan tertulis tersebut kepada Menteri.
- (4) Laporan hasil perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melakukan perjalanan dinas.
- (5) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, dapat melaksanakan perjalanan dinas luar negeri berikutnya setelah menyelesaikan seluruh kewajiban pelaporan.

**Pasal 27**

Pejabat yang diberikan wewenang untuk menerbitkan SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas yang dipergunakan ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN dan tenaga lainnya, wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterimanya.
- (2) Dalam hal harga tiket yang diperoleh ternyata di bawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang transportasi yang diterimanya.

- (3) Dalam hal biaya penginapan diperoleh ternyata dibawah harga yang telah ditetapkan maka Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN dan Non ASN, yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang penginapan yang diterimanya.
- (4) Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

**BAB VIII**  
**PEMBATALAN**  
**Pasal 29**

- (1) Dalam hal perjalanan dinas tidak dapat dilaksanakan karena alasan tertentu dapat dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
  - a. adanya keperluan dinas jabatan lainnya yang sangat mendesak/sangat penting dan tidak dapat ditunda; dan/atau
  - b. sebab lain yang disertai dengan dokumen pendukung yang relevan dengan alasan pembatalan.
- (3) Biaya yang timbul atas pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pada DPA SKPD.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 30**

Besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 24 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini ini.

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor :

- a. 114 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Walikota dan Wakil Walikota (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 114).
- b. 115 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 115).
- c. 116 Tahun 2019 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 118).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 32**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 29 Mei 2020



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 29 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,**



**BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 48**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 48 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**  
**WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA,**  
**PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,**  
**APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON**  
**APARATUR SIPIL NEGARA.**

**1. UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH**

| NO. | URAIAN            | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|-------------------|--------|--------------|
| (1) | (2)               | (3)    | (4)          |
| 1.  | UANG TRANSPORTASI | OH     | 100.000,00   |

**2. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI**

| NO. | URAIAN                         | SATUAN | BESARAN (Rp) |
|-----|--------------------------------|--------|--------------|
| (1) | (2)                            | (3)    | (4)          |
| 1.  | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH     | 300.000,00   |
| 2.  | PEJABAT ESELON II              | OH     | 250.000,00   |
| 3.  | PEJABAT ESELON III KEBAWAH     | OH     | 200.000,00   |

**3. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI**

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT (Rp) |
|-----|---------------------|--------|----------------|-------------|
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)            | (5)         |
| 1.  | ACEH                | OH     | 360.000,00     | 110.000,00  |
| 2.  | SUMATERA UTARA      | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 3.  | RIAU                | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU      | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 5.  | JAMBI               | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 6.  | SUMATERA SELATAN    | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 7.  | LAMPUNG             | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 8.  | BENGKULU            | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 9.  | BANGKA BELITUNG     | OH     | 410.000,00     | 120.000,00  |
| 10. | BANTEN              | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 11. | JAWA BARAT          | OH     | 430.000,00     | 130.000,00  |
| 12. | D.K.I. JAKARTA      | OH     | 530.000,00     | 160.000,00  |
| 13. | JAWA TENGAH         | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 14. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | 420.000,00     | 130.000,00  |
| 15. | JAWA TIMUR          | OH     | 410.000,00     | 120.000,00  |
| 16. | BALI                | OH     | 480.000,00     | 140.000,00  |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | 440.000,00     | 130.000,00  |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | 430.000,00     | 130.000,00  |
| 19. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | 360.000,00     | 110.000,00  |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | 430.000,00     | 130.000,00  |
| 23. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | 430.000,00     | 130.000,00  |
| 24. | SULAWESI UTARA      | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 25. | GORONTALO           | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |

| NO. | PROVINSI          | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) | DIKLAT (Rp) |
|-----|-------------------|--------|----------------|-------------|
| 26. | SULAWESI BARAT    | OH     | 410.000,00     | 120.000,00  |
| 27. | SULAWESI SELATAN  | OH     | 430.000,00     | 130.000,00  |
| 28. | SULAWESI TENGAH   | OH     | 370.000,00     | 110.000,00  |
| 29. | SULAWESI TENGGARA | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 30. | MALUKU            | OH     | 380.000,00     | 110.000,00  |
| 31. | MALUKU UTARA      | OH     | 430.000,00     | 130.000,00  |
| 32. | PAPUA             | OH     | 580.000,00     | 170.000,00  |
| 33. | PAPUA BARAT       | OH     | 480.000,00     | 140.000,00  |

#### 4. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

| NO. | URAIAN                         | SATUAN | LUAR KOTA (Rp) |
|-----|--------------------------------|--------|----------------|
| (1) | (2)                            | (3)    | (4)            |
| 1.  | PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH | OH     | 250.000,00     |
| 2.  | PEJABAT ESELON II              | OH     | 150.000,00     |

#### 5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

| NO. | PROVINSI                        | SATUAN | TARIF HOTEL                  |                                    |                                    |                                    |               |
|-----|---------------------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|     |                                 |        | KEPALA DAERAH/<br>KETUA DPRD | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/<br>GOLONGAN III | GOLONGAN I/II |
| (1) | (2)                             | (3)    | (4)                          | (5)                                | (6)                                | (7)                                | (8)           |
| 1.  | BUKITINGGI                      | OH     | Rp.2.500.000                 | Rp.2.250.000                       | Rp.1.500.000                       | Rp.1.000.000                       | Rp.600.000    |
| 2.  | TANAH DATAR                     | OH     | Rp.2.250.000                 | Rp.2.000.000                       | Rp.1.250.000                       | Rp.750.000                         | Rp.600.000    |
| 3.  | AGAM                            | OH     | Rp.2.000.000                 | Rp.1.750.000                       | Rp.1.150.000                       | Rp.750.000                         | Rp.600.000    |
| 4.  | PAYAKUMBUH                      | OH     | Rp.1.750.000                 | Rp.1.500.000                       | Rp.1.000.000                       | Rp.750.000                         | Rp.600.000    |
| 5.  | DAERAH SELAIN ANGKA 1,2,3 DAN 4 | OH     | Rp.1.500.000                 | Rp.1.250.000                       | Rp.900.000                         | Rp.650.000                         | Rp.400.000    |

#### 6. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

| NO. | PROVINSI         | SATUAN | TARIF HOTEL                  |                                    |                                    |                                    |               |
|-----|------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|     |                  |        | KEPALA DAERAH/<br>KETUA DPRD | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/<br>GOLONGAN III | GOLONGAN I/II |
| (1) | (2)              | (3)    | (4)                          | (5)                                | (6)                                | (7)                                | (8)           |
| 1.  | ACEH             | OH     | Rp4.420.000                  | Rp3.526.000                        | Rp1.294.000                        | Rp556.000                          | Rp556.000     |
| 2.  | SUMATERA UTARA   | OH     | Rp4.960.000                  | Rp1.518.000                        | Rp1.100.000                        | Rp530.000                          | Rp530.000     |
| 3.  | RIAU             | OH     | Rp3.820.000                  | Rp3.119.000                        | Rp1.650.000                        | Rp852.000                          | Rp852.000     |
| 4.  | KEPULAUAN RIAU   | OH     | Rp4.275.000                  | Rp1.854.000                        | Rp1.037.000                        | Rp792.000                          | Rp792.000     |
| 5.  | JAMBI            | OH     | Rp4.000.000                  | Rp3.337.000                        | Rp1.212.000                        | Rp580.000                          | Rp580.000     |
| 6.  | SUMATERA SELATAN | OH     | Rp5.850.000                  | Rp3.083.000                        | Rp1.571.000                        | Rp861.000                          | Rp861.000     |
| 7.  | LAMPUNG          | OH     | Rp4.491.000                  | Rp2.067.000                        | Rp1.140.000                        | Rp580.000                          | Rp580.000     |
| 8.  | BENGKULU         | OH     | Rp2.071.000                  | Rp1.628.000                        | Rp1.546.000                        | Rp630.000                          | Rp630.000     |
| 9.  | BANGKA BELITUNG  | OH     | Rp3.827.000                  | Rp2.838.000                        | Rp1.957.000                        | Rp622.000                          | Rp622.000     |
| 10. | BANTEN           | OH     | Rp5.725.000                  | Rp2.373.000                        | Rp1.000.000                        | Rp718.000                          | Rp718.000     |
| 11. | JAWA BARAT       | OH     | Rp5.381.000                  | Rp2.755.000                        | Rp1.006.000                        | Rp570.000                          | Rp570.000     |
| 12. | D.K.I. JAKARTA   | OH     | Rp5.850.000                  | Rp1.490.000                        | Rp992.000                          | Rp730.000                          | Rp730.000     |

| NO. | PROVINSI            | SATUAN | TARIF HOTEL                  |                                    |                                    |                                    |               |
|-----|---------------------|--------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|     |                     |        | KEPALA DAERAH/<br>KETUA DPRD | ANGGOTA DPRD/<br>PEJABAT ESELON II | PEJABAT ESELON III/<br>GOLONGAN IV | PEJABAT ESELON IV/<br>GOLONGAN III | GOLONGAN I/II |
| (1) | (2)                 | (3)    | (4)                          | (5)                                | (6)                                | (7)                                | (8)           |
| 13. | JAWA TENGAH         | OH     | Rp4.242.000                  | Rp1.480.000                        | Rp954.000                          | Rp600.000                          | Rp600.000     |
| 14. | D.I. YOGYAKARTA     | OH     | Rp5.017.000                  | Rp2.695.000                        | Rp1.384.000                        | Rp845.000                          | Rp845.000     |
| 15. | JAWA TIMUR          | OH     | Rp4.400.000                  | Rp1.605.000                        | Rp1.076.000                        | Rp664.000                          | Rp664.000     |
| 16. | BALI                | OH     | Rp4.890.000                  | Rp1.946.000                        | Rp990.000                          | Rp910.000                          | Rp910.000     |
| 17. | NUSA TENGGARA BARAT | OH     | Rp3.500.000                  | Rp2.648.000                        | Rp1.418.000                        | Rp580.000                          | Rp580.000     |
| 18. | NUSA TENGGARA TIMUR | OH     | Rp3.000.000                  | Rp1.493.000                        | Rp1.355.000                        | Rp550.000                          | Rp550.000     |
| 19. | KALIMANTAN BARAT    | OH     | Rp2.654.000                  | Rp1.538.000                        | Rp1.125.000                        | Rp538.000                          | Rp538.000     |
| 20. | KALIMANTAN TENGAH   | OH     | Rp4.901.000                  | Rp3.391.000                        | Rp1.160.000                        | Rp659.000                          | Rp659.000     |
| 21. | KALIMANTAN SELATAN  | OH     | Rp4.797.000                  | Rp3.316.000                        | Rp1.500.000                        | Rp540.000                          | Rp540.000     |
| 22. | KALIMANTAN TIMUR    | OH     | Rp4.000.000                  | Rp2.188.000                        | Rp1.507.000                        | Rp804.000                          | Rp804.000     |
| 23. | KALIMANTAN UTARA    | OH     | Rp4.000.000                  | Rp2.188.000                        | Rp1.507.000                        | Rp804.000                          | Rp804.000     |
| 24. | SULAWESI UTARA      | OH     | Rp4.919.000                  | Rp2.290.000                        | Rp924.000                          | Rp782.000                          | Rp782.000     |
| 25. | GORONTALO           | OH     | Rp4.168.000                  | Rp2.549.000                        | Rp1.431.000                        | Rp764.000                          | Rp764.000     |
| 26. | SULAWESI BARAT      | OH     | Rp4.076.000                  | Rp2.581.000                        | Rp1.075.000                        | Rp704.000                          | Rp704.000     |
| 27. | SULAWESI SELATAN    | OH     | Rp4.820.000                  | Rp1.550.000                        | Rp1.020.000                        | Rp732.000                          | Rp732.000     |
| 28. | SULAWESI TENGAH     | OH     | Rp2.309.000                  | Rp2.027.000                        | Rp1.567.000                        | Rp951.000                          | Rp951.000     |
| 29. | SULAWESI TENGGARA   | OH     | Rp2.475.000                  | Rp2.059.000                        | Rp1.297.000                        | Rp786.000                          | Rp786.000     |
| 30. | MALUKU              | OH     | Rp3.467.000                  | Rp3.240.000                        | Rp1.048.000                        | Rp667.000                          | Rp667.000     |
| 31. | MALUKU UTARA        | OH     | Rp3.440.000                  | Rp3.175.000                        | Rp1.073.000                        | Rp600.000                          | Rp600.000     |
| 32. | PAPUA               | OH     | Rp3.859.000                  | Rp3.318.000                        | Rp2.521.000                        | Rp829.000                          | Rp829.000     |
| 33. | PAPUA BARAT         | OH     | Rp3.872.000                  | Rp3.212.000                        | Rp2.056.000                        | Rp718.000                          | Rp718.000     |

**7. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI PERGI PULANG (PP)**

| NO. | KOTA   |                | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|--------|----------------|--------------------|--------------|
|     | ASAL   | TUJUAN         | BISNIS (Rp)        | EKONOMI (Rp) |
| (1) | (2)    | (3)            | (4)                | (5)          |
| 1.  | PADANG | JAKARTA        | 5.530.000,00       | 2.952.000,00 |
| 2.  | PADANG | BALIKPAPAN     | 10.942.000,00      | 5.369.000,00 |
| 3.  | PADANG | BANDAR LAMPUNG | 6.439.000,00       | 3.380.000,00 |
| 4.  | PADANG | BANDUNG        | 6.129.000,00       | 3.508.000,00 |
| 5.  | PADANG | BANJARMASIN    | 9.006.000,00       | 4.642.000,00 |
| 6.  | PADANG | BATAM          | 8.653.000,00       | 4.546.000,00 |
| 7.  | PADANG | BIAK           | 16.932.000,00      | 8.728.000,00 |
| 8.  | PADANG | DENPASAR       | 9.049.000,00       | 4.888.000,00 |
| 9.  | PADANG | JAYAPURA       | 17.381.000,00      | 9.327.000,00 |
| 10. | PADANG | YOGYAKARTA     | 7.969.000,00       | 4.000.000,00 |
| 11. | PADANG | KENDARI        | 11.167.000,00      | 5.722.000,00 |
| 12. | PADANG | MALANG         | 5.418.000,00       | 4.385.000,00 |
| 13. | PADANG | MANADO         | 14.012.000,00      | 6.546.000,00 |
| 14. | PADANG | MATARAM        | 9.060.000,00       | 4.867.000,00 |
| 15. | PADANG | PANGKAL PINANG | 7.337.000,00       | 3.883.000,00 |
| 16. | PADANG | MAKASSAR       | 10.974.000,00      | 5.402.000,00 |
| 17. | PADANG | PONTIANAK      | 8.193.000,00       | 4.460.000,00 |

| NO. | KOTA   |          | SATUAN BIAYA TIKET |              |
|-----|--------|----------|--------------------|--------------|
|     | ASAL   | TUJUAN   | BISNIS (Rp)        | EKONOMI (Rp) |
| (1) | (2)    | (3)      | (4)                | (5)          |
| 18. | PADANG | SEMARANG | 7.744.000,00       | 3.925.000,00 |
| 19. | PADANG | SOLO     | 7.744.000,00       | 4.065.000,00 |
| 20. | PADANG | SURABAYA | 9.199.000,00       | 4.364.000,00 |
| 21. | PADANG | TIMIKA   | 16.718.000,00      | 8.685.000,00 |

**8. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI DAN LUAR PROPINSI**

| NO. | URAIAN      | SATUAN     | BESARAN      |
|-----|-------------|------------|--------------|
| (1) | (2)         | (3)        | (4)          |
| 1.  | Biaya Taksi | Orang/Kali | Rp190.000,00 |

**9. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROPINSI YANG SAMA (ONE WAY)**

| NO.  | IBUKOTA PROVINSI | KABUPATEN/KOTA TUJUAN | SATUAN     | BESARAN      |
|------|------------------|-----------------------|------------|--------------|
| (1)  | (2)              | (3)                   | (4)        | (5)          |
| 1.   | Padang           | Kab. Agam             | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 2.   | Padang           | Kab. Dharmasraya      | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 3.   | Padang           | Kab. Lima Puluh Kota  | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 4.   | Padang           | Kab. Padang Pariaman  | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 5.   | Padang           | Kab. Pasaman          | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 6.   | Padang           | Kab. Pasaman Barat    | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 7.   | Padang           | Kab. Pesisir Selatan  | Orang/Kali | Rp205.000,00 |
| 8.   | Padang           | Kab. Sijunjung        | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 9.   | Padang           | Kab. Solok            | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 10.  | Padang           | Kab. Solok Selatan    | Orang/Kali | Rp250.000,00 |
| 11.  | Padang           | Kab. Tanah Datar      | Orang/Kali | Rp220.000,00 |
| 12.  | Padang           | Kota Bukit Tinggi     | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 13.  | Padang           | Kota Padang Panjang   | Orang/Kali | Rp210.000,00 |
| 14.  | Padang           | Kota Pariaman         | Orang/Kali | Rp200.000,00 |
| 15.  | Padang           | Kota Payakumbuh       | Orang/Kali | Rp225.000,00 |
| 16.  | Padang           | Kota Sawahlunto       | Orang/Kali | Rp215.000,00 |
| 17.. | Padang           | Kota Solok            | Orang/Kali | Rp210.000,00 |

**10. BANTUAN BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI**

| NO. | URAIAN                                  | SATUAN | BESARAN |
|-----|---|--------|---------|
| (1) | (2)                                     | (3)    | (4)     |
| 1.  | Padang – Kota/Kabupaten Solok           | Liter  | 30      |
| 2.  | Padang – Kabupaten Solok Selatan        | Liter  | 60      |
| 3.  | Padang – Kota Sawahlunto                | Liter  | 40      |
| 4.  | Padang – Kabupaten Sawahlunto Sijunjung | Liter  | 50      |
| 5.  | Padang – Kabupaten Dharmasraya          | Liter  | 55      |
| 6.  | Padang – Kota/Kabupaten Padang Pariaman | Liter  | 20      |
| 7.  | Padang – Kabupaten Agam                 | Liter  | 40      |
| 8.  | Padang – Kota Padang Panjang            | Liter  | 25      |
| 9.  | Padang – Kota Bukittinggi               | Liter  | 30      |
| 10. | Padang – Kabupaten 50 Kota              | Liter  | 50      |

|     |  |            |    |
|-----|--|------------|----|
| 11. | Padang – Kota Payakumbuh                       | Liter      | 40 |
| 12. | Padang – Kabupaten Pasaman/Pasaman Barat       | Liter      | 60 |
| 13. | Padang – Kabupaten Pesisir Selatan             | Liter      | 30 |
| 14. | Padang – Tanah Datar                           | Liter      | 30 |
| 15. | Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM | Liter/Hari | 10 |

### 11. BIAYA BBM PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

| NO. | URAIAN   | SATUAN     | BESARAN |
|-----|--|------------|---------|
| (1) | (2)  | (3)        | (4)     |
| 1.  | Padang – Banda Aceh                            | Liter      | 570     |
| 2.  | Padang – Medan                                 | Liter      | 372     |
| 3.  | Padang – Pekanbaru                             | Liter      | 170     |
| 4.  | Padang – Jambi                                 | Liter      | 320     |
| 5.  | Padang – Bengkulu                              | Liter      | 350     |
| 6.  | Padang – Palembang                             | Liter      | 435     |
| 7.  | Padang – Bandar Lampung                        | Liter      | 500     |
| 8.  | Padang – Jakarta                               | Liter      | 570     |
| 9.  | Kelebihan waktu perjalanan Dinas diberikan BBM | Liter/Hari | 30      |

### 12. BIAYA TRANSPORTASI/TIKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

| NO. | KOTA                | Tarif<br>(dalam US\$) |
|-----|---------------------|-----------------------|
|     | <b>ASIA</b>         |                       |
| 1.  | Bandar Seri Begawan | 919                   |
| 2.  | Bangkok             | 823                   |
| 3.  | Beijing             | 1.623                 |
| 4.  | Canberra            | 2.500                 |
| 5.  | Colombo             | 1.628                 |
| 6.  | Darwin              | 3.964                 |
| 7.  | Davao City          | 1.641                 |
| 8.  | Dhaka               | 1.092                 |
| 9.  | Hanoi               | 1.656                 |
| 10. | Ho Chi Minh         | 1.235                 |
| 11. | Hongkong            | 1.257                 |
| 12. | Islamabad           | 2.501                 |
| 13. | Johor Baharu        | 525                   |
| 14. | Karachi             | 2.321                 |
| 15. | Kinabalu            | 694                   |
| 16. | Kuala Lumpur        | 585                   |
| 17. | Manila              | 1.150                 |
| 18. | Melbourne           | 2.858                 |
| 19. | New Delhi           | 1.673                 |
| 20. | Nourmea             | 3.780                 |
| 21. | Osaka               | 1.864                 |
| 22. | Penang              | 545                   |
| 23. | Perth               | 1.525                 |
| 24. | Pnom Penh           | 1.627                 |
| 25. | Port Moresby        | 5.034                 |
| 26. | Pyongyang           | 1.737                 |
| 27. | Seoul               | 1.737                 |
| 28. | Singapore           | 403                   |
| 29. | Sydney              | 2.557                 |

| NO. | KOTA          | Tarif<br>(dalam US\$) |
|-----|---------------|-----------------------|
| 30. | Tokyo         | 1.835                 |
| 31. | Vanimo        | 2.380                 |
| 32. | Vientiane     | 1.420                 |
| 33. | Wellington    | 3.413                 |
| 34. | Yangon        | 1.053                 |
| 35. | Abu Dhabi     | 2.727                 |
| 36. | Amman         | 3.545                 |
| 37. | Baghdad       | 3.545                 |
| 38. | Beirut        | 3.730                 |
| 39. | Damascus      | 3.325                 |
| 40. | Doha          | 2.745                 |
| 41. | Jeddah        | 3.321                 |
| 42. | Kaboul        | 3.208                 |
| 43. | Kuwait        | 3.110                 |
| 44. | Riyadh        | 3.000                 |
| 45. | Sanaa         | 3.679                 |
| 46. | Teheran       | 2.920                 |
| 47. | Ankara        | 3581                  |
| 48. | Mahama        | 4700                  |
| 49. | Astana        | 8962                  |
| 50. | Muscat        | 3727                  |
|     | <b>AFRIKA</b> | 5.552                 |
| 51. | Addis Ababa   | 5.710                 |
| 52. | Algeria       | 3.735                 |
| 53. | Aljazair      | 8.282                 |
| 54. | Antananarivo  | 4.037                 |
| 55. | Cairo         | 7.330                 |
| 56. | Cape Town     | 8.555                 |
| 57. | Dakkar        | 5.733                 |
| 58. | Dar Es Salaam | 5.747                 |
| 59. | Harare        | 6.275                 |
| 60. | Johannesburg  | 3.915                 |
| 61. | Khartoum      | 6.818                 |
| 62. | Lagos         | 6.081                 |
| 63. | Nairobi       | 5.665                 |
| 64. | Rabbat        | 4.175                 |
| 65. | Tunisia       | 7.510                 |
| 66. | Windhoek      | 4.975                 |
| 67. | Tripoli       |                       |
|     | <b>EROPA</b>  | 3.331                 |
| 68. | Amsterdam     | 8.041                 |
| 69. | Attens        | 5.350                 |
| 70. | Beogard       | 3.959                 |
| 71. | Berlin        | 4.355                 |
| 72. | Bern          | 3.753                 |
| 73. | Bonn          | 3.771                 |
| 74. | Bratislava    | 3.870                 |
| 75. | Brussels      | 4.113                 |
| 76. | Bucharest     | 3.730                 |
| 77. | Copenhagen    | 4.333                 |
| 78. | Geneva        | 3.825                 |
| 79. | Hamburg       | 3.681                 |
| 80. | Helsinki      | 5.193                 |
| 81. | Kiev          | 3.383                 |
| 82. | Lisbon        | 4.153                 |

| NO.  | KOTA              | Tarif<br>(dalam US\$) |
|------|-------------------|-----------------------|
| 83.  | London            | 3.631                 |
| 84.  | Madrid            | 3.541                 |
| 85.  | Marseilles        | 5.143                 |
| 86.  | Moscow            | 4.049                 |
| 87.  | Oslo              | 3.331                 |
| 88.  | Paris             | 3.451                 |
| 89.  | Prague            | 3.851                 |
| 90.  | Rome              | 3.612                 |
| 91.  | Sofia             | 3.433                 |
| 92.  | Stockholm         | 7.343                 |
| 93.  | Tashkent          | 3.357                 |
| 94.  | Vienna            | 3.447                 |
| 95.  | Warsaw            |                       |
|      | <b>AMERIKA</b>    | 7.713                 |
| 96.  | Bogota            | 5.970                 |
| 97.  | Brazillia         | 5.970                 |
| 98.  | Buenos Aires      | 5.130                 |
| 99.  | Caracas           | 3.587                 |
| 100. | Chicago           | 7.335                 |
| 101. | Havana            | 3.591                 |
| 102. | Houston           | 3.178                 |
| 103. | Los Angeles       | 3.966                 |
| 104. | Mexico City       | 3.753                 |
| 105. | New York          | 4.083                 |
| 106. | Ottawa            | 7.353                 |
| 107. | Paramaribo        | 2.771                 |
| 108. | San Fransisco     | 8.900                 |
| 109. | Santiago De Chile | 3.201                 |
| 110. | Toronto           | 3.277                 |
| 111. | Vancouver         | 3.743                 |
| 112. | Washington        | 13.570                |
| 113. | Panama City       | 12.127                |
| 114. | Quito             |                       |

### 13. BIAYA PAKET PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

| No | Negara                              | Ibukota       | Uang Paket (US \$) |        | Ket |
|----|-------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-----|
|    |                                     |               | Gol. A             | Gol. B |     |
|    | <b>Amerika</b>                      |               |                    |        |     |
| 1  | Amerika Serikat                     | New York      | 342                | 302    |     |
| 2  | Kanada                              | Ottawa        | 250                | 210    |     |
| 3  | Meksiko                             | Mexico City   | 280                | 240    |     |
| 4  | Kuba                                | Hanava        | 220                | 180    |     |
| 5  | Venezuela                           | Caracas       | 285                | 245    |     |
| 6  | Argentina                           | Buenaos Aires | 240                | 200    |     |
| 7  | Brazil                              | Brazilia      | 220                | 180    |     |
| 8  | Suriname                            | Paramaribo    | 220                | 180    |     |
| 9  | Chile                               | Santiago      | 220                | 180    |     |
| 10 | Columbia                            | Columbia      | 220                | 180    |     |
|    | <b>Europa Barat dan Skandinavia</b> |               |                    |        |     |
| 11 | Inggris                             | London        | 368                | 328    |     |
| 12 | Norwegia                            | Osio          | 285                | 245    |     |
| 13 | Prasia                              | Paris         | 322                | 382    |     |
| 14 | Belgia                              | Brussel       | 270                | 230    |     |

| No | Negara                       | Ibukota       | Uang Paket (US \$) |        | Ket |
|----|------------------------------|---------------|--------------------|--------|-----|
|    |                              |               | Gol. A             | Gol. B |     |
| 15 | Belanda                      | Den Hag       | 270                | 230    |     |
| 16 | Swiss                        | Bern/Geneva   | 304                | 264    |     |
| 17 | Swedia                       | Stockholm     | 288                | 248    |     |
| 18 | Austria                      | Wina          | 316                | 276    |     |
| 19 | Finlandia                    | Helsinki      | 250                | 210    |     |
| 20 | Denmark                      | Kopenhagen    | 240                | 200    |     |
| 21 | Italia                       | Roma          | 338                | 398    |     |
| 22 | Jerman                       | Frankfurt     | 245                | 205    |     |
| 23 | Spain                        | Madrid        | 269                | 229    |     |
|    | <b>Eropa Timur dan Rusia</b> |               |                    |        |     |
| 24 | Rusia                        | Moscow        | 362                | 342    |     |
| 25 | Bulgaria                     | Sofia         | 220                | 280    |     |
| 26 | Czech Republic               | Praha         | 236                | 296    |     |
| 27 | Hungary                      | Budapest      | 220                | 280    |     |
| 28 | Poland                       | Warsaw        | 220                | 280    |     |
| 29 | Romania                      | Bucharest     | 243                | 243    |     |
| 30 | Yugoslavia                   | Belgrade      | 220                | 280    |     |
|    | <b>Afrika</b>                |               |                    |        |     |
| 31 | Algeria                      | Algiers       | 249                | 209    |     |
| 32 | Egypt                        | Cairo         | 175                | 155    |     |
| 33 | Morocco                      | Rabat         | 178                | 158    |     |
| 34 | Tunisia                      | Tunis         | 185                | 165    |     |
| 35 | Nigeria                      | Lagos         | 259                | 239    |     |
| 36 | Senegal                      | Dakar         | 192                | 172    |     |
| 37 | Ethiopia                     | Addis Ababa   | 160                | 140    |     |
| 38 | Kenya                        | Nairobi       | 181                | 161    |     |
| 39 | Madagascar                   | Tananarive    | 171                | 151    |     |
| 40 | Tanzania                     | Dar Es Salaam | 181                | 161    |     |
| 41 | Zimbabwe                     | Harare        | 214                | 194    |     |
| 42 | Namibia                      | Windhoek      | 160                | 140    |     |
|    | <b>Timur Tengah</b>          |               |                    |        |     |
| 43 | Iraq                         | Baghdad       | 200                | 180    |     |
| 44 | Saudi Arabia                 | Riyadh        | 200                | 180    |     |
| 45 | UAE                          | Abu Dhabi     | 266                | 246    |     |
| 46 | Kuwait                       | Kuwait        | 234                | 214    |     |
| 47 | Jordan                       | Amman         | 195                | 175    |     |
| 48 | Turkey                       | Ankara        | 175                | 155    |     |
| 49 | Iran                         | Tehran        | 165                | 145    |     |
| 50 | Syria                        | Damascus      | 180                | 160    |     |
|    | <b>Asia Selatan</b>          |               |                    |        |     |
| 51 | India                        | New Delhi     | 210                | 190    |     |
| 52 | Bangladesh                   | Dhaka         | 165                | 145    |     |
| 53 | Pakistan                     | Islamabad     | 171                | 151    |     |
| 54 | Sri Lanka                    | Colombo       | 165                | 145    |     |
|    | <b>Asia Utara</b>            |               |                    |        |     |
| 55 | Hong Kong                    | Hong Kong     | 262                | 242    |     |
| 56 | Japan                        | Tokyo         | 250                | 230    |     |
| 57 | Philippines                  | Manila        | 215                | 195    |     |
| 58 | South Korea                  | Seoul         | 266                | 246    |     |
| 59 | North Korea                  | Pyongyang     | 205                | 185    |     |
| 60 | China                        | Beijing       | 205                | 185    |     |

| No                                | Negara            | Ibukota            | Uang Paket (US \$) |        | Ket |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------|-----|
|                                   |                   |                    | Gol. A             | Gol. B |     |
| <b>Asia Tenggara</b>              |                   |                    |                    |        |     |
| 61                                | Singapura         | Singapura          | 220                | 200    |     |
| 62                                | Malaysia          | Kuala Lumpur       | 210                | 190    |     |
| 63                                | Thailand          | Bangkok            | 195                | 175    |     |
| 64                                | Burma             | Rangoon            | 195                | 175    |     |
| 65                                | Laos              | Vientiane          | 195                | 175    |     |
| 66                                | Vietnam           | Ho Chi Minh        | 195                | 175    |     |
| 67                                | Brunai Darussalam | Bandar Sri Begawan | 195                | 175    |     |
| 68                                | Philipina         | Manila             | 220                | 200    |     |
| <b>Asia Pasifik dan Australia</b> |                   |                    |                    |        |     |
| 69                                | Australia         | Canberra           | 243                | 223    |     |
| 70                                | Selandia Baru     | Wellington         | 217                | 197    |     |
| 71                                | New Caledonia     | Noumea             | 165                | 145    |     |
| 72                                | Papua Nugini      | Port Moresby       | 171                | 151    |     |


  
**WALI KOTA PADANG,**  
**MAHYELDI**